PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (MUSRENBANGDES) DI DESA POPO KECAMATAN SATARMESE UTARA KABUPATEN MANGGARAI

Petrus Inzaghi Donalson Waku¹, Yohana Fransiska Medho²
shigiwaku21@gmail.com¹, yohanamedho@gmail.com²
Universitas Katolik Widya Mandira Kupang

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbangdes) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat arsipatif, dimana pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu aplikasinya melalui Forum Musyawarah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (musrenbang desa) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional/wilayah dan pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif, penentuan informan dengan model dokumentasi, wawancara dan observasi, sedangkan Teknik analisis data dengan metode pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan musrenbangdes dilakukan secara bertahap yaitu mulai dari tahap pra musrenbangdes terjadi perdebatan yang cukup ramai dalam memperjuangkan program usulan, tahap pelaksanaan musrenbangdes proses penetapan program usulan, pembuatan berita acara dan penentuan tim delegasi desa serta tahap pasca musrenbangdes tersusunnya Perdes tentang RKPDes dan APBDes. Kendala musrenbangdes penyelenggaraan musrenbangdes malam hari, tingkat keterwakilan yang tidak representatif.

Kata Kunci: Partisipasi, Perencanaan, Musrenbangdes.

ABSTRACT

This study is entitled "Community Participation in the Implementation of Village Development Planning Deliberations (Musrenbangdes) in Popo Village, North Satarmese District, Manggarai Regency. The formulation of the problem in this study is How is community participation in the implementation of development planning deliberations (musrenbangdes) in Popo Village, North Satarmese District, Manggarai Regency. The purpose of this study is to describe community participation in the implementation of Village Development Planning Deliberations (musrenbangdes) in Popo Village, North Satarmese District, Manggarai Regency. Community involvement in the development policy-making process is regulated in stages, this shows that the process of formulating development policies is archival, where the government determines development policies, while the community plays a role in providing input to the government about what the community needs. One of its applications is through the Development Planning Implementation Deliberation Forum (village musrenbang) which is implemented in stages starting

*from the village/sub-district, sub-district, district/city, provincial, regional/territory and central levels. The research method used is descriptive-qualitative, determining informants using documentation, interview and observation models, while data analysis techniques use data collection methods, data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the study showed that the implementation of the village development planning meeting was carried out in stages, namely starting from the pre-village development planning stage, there was quite a lively debate in fighting for the proposed program, the implementation stage of the village development planning meeting, the process of determining the proposed program, making minutes and determining the village delegation team, and the post-village development planning meeting, the preparation of the Village Regulation on the Village Work Plan and Village Budget. The obstacles to the village development planning meeting were the implementation of the village development planning meeting at night, and the level of representation that was not representative. **Keywords:** Participation, Planning, Village Development Planning Meeting.*

PENDAHULUAN

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan pembangunan diatur secara bertahap, hal ini menunjukkan bahwa proses penyusunan kebijakan pembangunan bersifat arsipatif, dimana pemerintah yang menjadi penentu kebijakan pembangunan, sedangkan masyarakat berperan memberikan masukan kepada pemerintah tentang apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu aplikasinya melalui Forum Musyawarah Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (musrenbang desa) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, regional/wilayah dan pusat.

Forum musyawarah ini merupakan media yang cukup efektif untuk menampung aspirasi masyarakat yang sekaligus juga menjadi media pemberdayaan dan partisipasi masyarakat selaku subjek dan obyek dalam proses pembangunan. Pembangunan harus menerapkan prinsip-prinsip desentralisasi, bergerak dari bawah mengikut sertakan masyarakat secara aktif, dilaksanakan dari dan bersama masyarakat. Dengan cara ini pemerintah semakin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan dan pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dan mengambil keputusan, dalam rangka memenuhi hak-hak dasarnya, salah satunya melalui proses Musrenbang. Partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembangunan tidak hanya dalam pelaksanaannya saja namun harus dimulai pada tahap awal yaitu perencanaan sampai pada tahap evaluasi program pembangunan.

Menurut Adisasmita (2006,34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai bottom-up planning. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut. Prinsip pembangunan yang berpusat pada rakyat menegaskan masyarakat harus menjadi pelaku utama dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan diharapkan menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan. Adisasmita (2006:42) juga mengatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program/proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk

berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan. Seiring dengan semangat reformasi maka pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan perencanaan dan penganggaran yang diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang partisipatif khususnya ditingkat lokal. UU Desa Nomor 3 Tahun 2024 Disahkan, Jabatan Kades jadi 8 Tahun. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa telah disahkan pada April 2024. Salah satu poin penting dalam Undang-Undang adalah perubahan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dengan maksimal dua periode. Kebijakan tersebut mengatur sistem perencanaan yang bersifat top down serta perencanaan yang bersifat bottom up untuk menciptakan ruang publik sebagai wadah partisipasi. Dalam hal ini upaya penciptaan wadah partisipasi oleh pemerintah salah satunya adalah dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang merupakan perencanaan kegiatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk pelaksanaan tahun berikutnya.

Meskipun banyak pihak yang mengakui bahwa desa mempunyai peranan yang besar bagi kota, namun tetap saja desa masih dipandang rendah dalam hal ekonomi atau pun yang lainnya. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pembangunan pedesaan harus menjadi prioritas utama dalam segenap rencana strategi dan kebijakan pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat, diantaranya dengan melakukan musyawarah perencanaan pembangunan (Adisasmita 2006:42). Pada sisi yang lain, penyelenggara musrenbang desa seringkali belum mencerminkan semangat musyawarah yang bersifat partisipatif dan dialogis. Bahkan musrenbang desa sering kali menjadi forum yang tidak bersahabat bagi warga masyarakat, terutama kelompok miskin dan perempuan dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan. Beberapa penyebab dan kendala yang dapat diidentifikasi antara lain: tidak cakupnya fasilitator untuk memandu forum-forum perencanaan partisipatif dan inklusif, metodologi yang tidak sesuai, kurang kesediaan media bantu, dan kurangnya kapasitas lembaga penyelenggara (Adisasmita 2006:42).

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen yang sangat mempengaruhi keberhasilan program perencanaan pembangunan. Salah satu penyebab kegagalan suatu program adalah kurangnya partisipasi elemen-elemen pendukung program tersebut. Akan tetapi partisipasi masyarakat merupakan salah satu masalah yang kompleks, dimana banyak terdapat faktor-faktor yang membuat seseorang tersebut mendukung atau tidak mendukung suatu program. Kemudian juga dilihat dari kondisi riil sementara tentang aparat Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai. Menurut pengamatan menunjukkan bahwa kurangnya peranan Kepala Desa selaku aparatur pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya terutama untuk menyiapkan bahan dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan yang hasilnya masih minim atau belum terlaksana secara optimal. Sepertihalnya, pemerintah desa akan mengadakan rapat atau musrenbang mengenai perencanaan Pelatihan Kelompok Kerja Pengrajin Kain Tenun yang akan diadakan di kantor desa. Namun informasi yang diberikan kepada ketua RT masing-masing masih sangat kurang jelas dan tidak pasti. Sehingga, masyarakat desa merasa informasi tersebut belum tentu pasti adanya dan membuat masyarakat enggan untuk mengikuti rapat tersebut. Oleh sebab itu, permasalahan tersebut mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan. Masih lemahnya peranan pemerintah desa untuk mengajak atau menghimbau masyarakat agar ikut berpartisipasi menyampaikan pendapat dalam pengambilan keputusan menyangkut

kepentingan masyarakat terkait dalam pelaksanaan pembangunan di Desa. Maka disini terlihat bahwa, lemahnya peran dari pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Kapasitas yang masih rendah merupakan bagian dari permasalahan yang ditunjukkan dilapangan. Menunjukkan bahwa kurangnya peranan pemerintah desa dalam menangani masalah tersebut.

Berkaitan dengan upaya pembangunan desa, partisipasi masyarakat mempunyai peran penting. Partisipasi masyarakat penting dalam Upaya Pembangunan desa karena Pembangunan desa merupakan Upaya memajukan dan mencapai kesejahteraan masyarakat desa. Kemajuan dan kesejahteraan desa dapat dicapai melalui Pembangunan di desa dengan memanfaatkan poyensi-potensi yang ada di desa. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat desa secara individu dan keluarga akan berdampak bagi kemajuan desa secara kelembagaan. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan maka diharapkan hasil dari pembangunan dapat sesuai dengan yang diharapkan, partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan desa dimulai dari penerimaan informasi perencanaan, pembangunan, serta pelaksanaan program. Dengan adanya peran partisipasi masyarakat maka hasil dari pembangunan yang dilakukan nantinya diharapkan dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Dengan penerapan perencanaan partisipatif kemungkinan dapat membuka cakrawala pikiran masyarakat/pelaku pembangunan desa untuk menemukan masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki sehingga akan timbul kemampuan dalam merumuskan dan merencanakan pembangunan yang sesuai dengan kondisi desa serta mendokumentasikan perencanaan pembangunan desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Desa Popo.

Berdasarkan hasil observasi awal di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai, sebagaimana masyarakat ada yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) sudah baik, namun ada juga yang mengatakan bahwa partisipasi masyarakat masih kurang. Ini terlihat saat pelaksanaan rapat kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), perwakilan tokoh masyarakat yang diundang tidak hadir semua saat Musrenbang dan hanya diwakili oleh tiap ketua RT, kurangnya komunikasi dua arah antara masyarakat dan pemerintah Desa dari komunikasi pemberian informasi dan usulan pembangunan yang tidak sejalan dengan program desa serta saat penentuan skala prioritas perencanaan pembangunan terjadi kecemburuan antar masyarakat atau ketua RT dimana mereka menginginkan daerahnya yang selalu masuk dalam prioritas program pembangunan tanpa melihat daerah lain yang lebih membutuhkan. Partisipasi masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, dimana partisipasi masyarakat sebagai salah satu elemen proses pembangunan desa, karena itu partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan desa perlu dibangkitkan terlebih dahulu. Partisipasi masyarakat yang merupakan tolak ukur dalam menilai apakah merupakan proyek pembangunan masyarakat atau bukan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (musrenbangdes) dilakukan setiap tahun. Musrenbangdes merupakan forum partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat desa untuk merumuskan dan menentukan prioritas pembangunan desa. Musrenbangdes bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan desa dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Musrenbangdes merupakan salah satu mekanisme penting dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia. Dalam penyelenggaraanya, Musrenbangdes memiliki beberapa ketentuan, diantaranya:

1. Kepala Desa yang menyelenggarakan musyawarah

2. Musyawarah diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa dan unsur perwakilan masyarakat
3. Kepala Desa wajib memastikan kehadiran undangan dari masyarakat berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Musrenbang Desa) di Desa Popo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai”.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah deskriptif kualitatif, bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan secara mendalam mengenai partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) di Desa Popo. Penelitian ini bertujuan menjawab permasalahan masa kini dengan pendekatan observasional dan interpretatif terhadap indikator-indikator yang telah ditentukan. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti berusaha memahami fenomena partisipasi dari perspektif informan secara langsung melalui studi pustaka dan hasil lapangan, sehingga menghasilkan analisis yang mendalam dan menyeluruh.

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Popo, Kecamatan Satarmese Utara, Kabupaten Manggarai. Fokus variabel dalam penelitian ini adalah partisipasi masyarakat, yang dianalisis melalui tiga tahapan utama dalam Musrenbangdes, yakni pra-musrenbang (pembentukan panitia dan penjangkaran aspirasi melalui musyawarah dusun), pelaksanaan musrenbang (gelar rapat, pembahasan saran, dan penetapan skala prioritas), serta pasca-musrenbang (penyusunan Peraturan Desa). Informan yang dipilih berjumlah sepuluh orang, termasuk kepala desa, tokoh masyarakat, dan perangkat desa, untuk mendapatkan data yang relevan dan beragam.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara terstruktur. Data primer diperoleh langsung dari informan, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen resmi dan catatan administratif desa. Validitas data diuji menggunakan triangulasi sumber dan waktu, sementara analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditetapkan secara bertahap dan dapat disesuaikan berdasarkan konsistensi dan keabsahan data lapangan. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang objektif mengenai partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa proses Musrenbangdes di Desa Popo terbagi dalam tiga tahap utama, yakni pra-musrenbang, pelaksanaan, dan pasca-musrenbang. Tahap pra-musrenbang dimulai dengan pembentukan panitia yang bertanggung jawab menyusun agenda kegiatan dan menyebarluaskan undangan kepada masyarakat. Pada tahap ini, panitia juga menjangkaran aspirasi melalui musyawarah dusun (musdus), yang menjadi ruang awal bagi masyarakat untuk menyuarakan kebutuhan pembangunan di lingkungannya.

Panitia Musrenbangdes di Desa Popo terdiri dari perangkat desa dan tokoh masyarakat, yang memiliki peran sentral dalam mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan. Masyarakat dilibatkan sejak awal melalui forum-forum kecil di tingkat RT dan RW yang difasilitasi oleh panitia. Informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Musrenbangdis disampaikan secara terbuka, namun hambatan komunikasi masih menjadi persoalan yang kerap menghambat keterlibatan masyarakat secara menyeluruh.

Musyawarah dusun merupakan wadah utama untuk mengumpulkan usulan program pembangunan dari masyarakat. Di dalamnya, masyarakat berdiskusi mengenai prioritas kebutuhan seperti jalan, air bersih, dan pelatihan keterampilan. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa hanya sebagian masyarakat yang aktif terlibat, dan keterwakilan kelompok perempuan serta warga miskin masih sangat minim.

Tahap pelaksanaan Musrenbangdes dilaksanakan dalam forum terbuka yang dipimpin oleh kepala desa. Acara dibuka dengan sambutan dan penjelasan teknis mengenai tujuan serta alur kegiatan. Peserta Musrenbang berasal dari berbagai elemen masyarakat, termasuk BPD, perangkat desa, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Partisipasi aktif ditunjukkan oleh beberapa peserta melalui diskusi dan penyampaian saran.

Usulan-usulan dari musyawarah dusun dibahas ulang untuk menentukan skala prioritas yang realistis dan sesuai dengan kapasitas dana desa. Perdebatan yang muncul berkaitan dengan ketimpangan usulan antar dusun menjadi catatan penting dalam musyawarah ini. Ada kecenderungan setiap perwakilan dusun menginginkan programnya diprioritaskan, sehingga dibutuhkan pendekatan musyawarah yang adil.

Penetapan skala prioritas dilakukan dengan mempertimbangkan urgensi kebutuhan dan keterjangkauan pembiayaan. Beberapa usulan seperti peningkatan jalan dusun dan penyediaan sarana air bersih akhirnya ditetapkan sebagai program utama. Hasil keputusan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa, BPD, dan perwakilan peserta Musrenbang.

Kendala dalam pelaksanaan Musrenbangdes antara lain berkaitan dengan waktu pelaksanaan yang sering diadakan pada malam hari, sehingga menyulitkan partisipasi kaum perempuan dan warga lanjut usia. Selain itu, minimnya informasi tentang hasil-hasil musyawarah sebelumnya mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap forum ini.

Tahap pasca-musrenbang meliputi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) yang berisi Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan APBDes. Penyusunan dilakukan oleh tim kecil yang dibentuk dalam Musrenbangdes, yang kemudian menyampaikan dokumen ini ke pihak kecamatan untuk sinkronisasi program tingkat desa dan kecamatan.

Pemerintah desa menyusun laporan hasil Musrenbangdes untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat. Namun, tingkat sosialisasi hasil musyawarah ini dinilai masih rendah, menyebabkan banyak masyarakat tidak mengetahui program apa yang akhirnya akan dilaksanakan di desanya.

Partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan cenderung cukup baik, namun belum merata. Masyarakat yang aktif terlibat sebagian besar adalah tokoh masyarakat dan kepala RT/RW, sementara warga umum kurang menunjukkan antusiasme. Hal ini menunjukkan bahwa proses musyawarah masih bersifat elitis.

Sebagian warga mengaku tidak mendapatkan undangan resmi atau informasi yang jelas tentang pelaksanaan Musrenbangdes, sehingga mereka tidak hadir dalam forum tersebut. Ini menjadi cerminan bahwa komunikasi antara pemerintah desa dan masyarakat belum sepenuhnya efektif dan inklusif.

Keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang telah disepakati juga masih terbatas. Setelah penetapan program, masyarakat tidak sepenuhnya dilibatkan dalam pengawasan atau implementasi kegiatan, seperti pembangunan fisik atau pelatihan keterampilan.

Evaluasi terhadap partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa sebagian besar warga merasa kurang dilibatkan dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Mereka menginginkan forum yang lebih demokratis, terbuka, dan inklusif, serta dilaksanakan pada

waktu yang lebih fleksibel.

Pemerintah desa dinilai perlu meningkatkan kualitas fasilitasi musyawarah, terutama dalam membangun komunikasi dua arah yang sehat antara aparat desa dan masyarakat. Hal ini penting agar Musrenbangdes benar-benar menjadi ruang demokrasi partisipatif.

Hambatan lainnya juga muncul dari sisi kapasitas sumber daya manusia pemerintah desa dalam merangkul seluruh aspirasi masyarakat. Kurangnya pelatihan dan pendampingan bagi perangkat desa dalam menjalankan peran mereka sebagai fasilitator pembangunan turut mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat.

Musrenbangdes di Desa Popo sebetulnya telah memenuhi prosedur administratif, namun belum sepenuhnya berhasil dalam membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai pelaku pembangunan. Masyarakat masih cenderung memosisikan diri sebagai penerima program, bukan sebagai perencana dan pengawas.

Dokumentasi hasil Musrenbangdes telah disusun secara lengkap, namun belum banyak digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penyusunan rencana pembangunan tahun berikutnya. Ini membuat proses pembangunan desa berjalan stagnan dan kurang progresif.

Penelitian ini menekankan bahwa partisipasi masyarakat bukan sekadar kehadiran dalam forum musyawarah, tetapi juga sejauh mana suara mereka diperhitungkan dalam keputusan akhir. Oleh karena itu, perlu pendekatan yang lebih partisipatif, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan evaluasi pembangunan.

Penguatan kelembagaan desa, peningkatan kapasitas perangkat, serta edukasi publik kepada warga desa tentang pentingnya keterlibatan dalam pembangunan menjadi langkah strategis untuk memperbaiki kualitas Musrenbangdes. Jika ini dijalankan secara konsisten, maka Musrenbangdes akan benar-benar menjadi ruang demokrasi lokal yang efektif.

Kesimpulannya, partisipasi masyarakat Desa Popo dalam Musrenbangdes berada pada tingkat sedang. Meskipun ada mekanisme formal yang dilaksanakan sesuai aturan, namun secara substansi, masih terdapat tantangan dalam mewujudkan partisipasi yang sejati. Diperlukan usaha kolektif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui Musrenbangdes yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan warga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan dengan judul “Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa” Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa melalui Musrenbangdes telah berjalan, namun belum optimal pada seluruh tahap. Diperlukan upaya peningkatan kapasitas masyarakat, transparansi informasi, serta penguatan kelembagaan desa agar proses Musrenbangdes benar-benar menjadi forum partisipatif, demokratis, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Proses musrenbangdes di Desa Popo terbagi menjadi tiga tahapan yaitu tahap pra musrenbangdes, tahap pelaksanaan dan tahap pasca musrenbangdes. Partisipasi masyarakat dalam pra musrenbangdes yang diawali saat musrenbangdes tergolong baik karena diantara yang hadir banyak yang mengajukan usulan program pembangunan diangkat dari permasalahan yang dihadapi di lingkungan tempat tinggalnya. Pada forum musrenbangdes terjadi perdebatan yang cukup ramai diantara peserta yang saling memperjuangkan usulan programnya untuk diprioritaskan. Namun pada akhir musyawarah dapat menghasilkan keputusan bersama program-program yang akan diajukan dari tingkat dusun. Sebelum ditetapkan skala prioritas tim melakukan kroscek di lapangan untuk

membuktikan tingkat kebenaran program yang diusulkan. Setelah pemeringkatan berdasar skala prioritas disepakati oleh peserta musyawarah, dibuat berita acara dan penentuan tim delegasi desa yang akan ditugaskan mengawal pada forum musrenbang kecamatan. Pasca musrenbangdes pemerintah desa menyusun perdes tentang RKPDes dan APBDes sebagai panduan pelaksanaan pembangunan desa. Program usulan yang dapat didanai dengan APBDes serta swadaya gotongroyong masyarakat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat tidak boleh dilimpahkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian dalam pelaksanaan program pembangunan sejauh mungkin mengutamakan partisipasi masyarakat lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ali, M. (1985). *Penelitian Pendidikan Prosedur dan Strategi*, Bandung: Angkasa.
- Cohen, Uphoof dalam Soepomo. 1992. *Pembangunan Masyarakat*. Jakarta: CV. Karako.
- Dina Anggaraini Puti. 2019. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Pekanbaru Baru:
- Humaidi. 2021. *Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Musyawarah Pembangunan*. Sumatra Selatan:
- Huraerah, Abu. 2008. *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat, Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humanora.
- Ndraha, Taliziduhu. 1987. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Tinggal Landas*. Jakarta: Bina Aksara.
- Merry Agustin. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Melalui Musrenbang*. Surabaya:
- Perundang-Undangan dan Dokumen Desa Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Solekhan, Moch. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, Malang: Setara Press
- Ditjen Bina Bangda - Departemen Dalam Negeri. 2008. *Panduan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa/Kelurahan*. Jakarta.
- Pasolong, H. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Putri Rahayuningsih, Siti Arbayah. 2019. *Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Desa*.
- Ricardo Tahulending. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) Desa*. Sumatra Utara:
- Sastropetro, RA. Santoso, 1988. *Partisipasi, komunikasi, persuasi, dan disiplin dalam pembangunan penerbitalumni*, Bandung.
- Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi. I.N. 2005. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Tahulending, R, Kaunag, M. & Sumampw, I. 2018. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Musyawarah*
- Mulyadi, mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Nadi Pustaka.
- Mulyadi, mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Jakarta : Nadi Pustaka.